KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : RUU KPK - Romo Benny: Berbahaya Jika Revisi Dilanjutkan
Tanggal : Sabtu, 05 Desember 2015
Surat Kabar : Suara Karya
Halaman : 5

RUU KPK

Romo Benny: Berbahaya Jika Revisi Dilanjutkan

JAKARTA (Suara Karya): Masih banyaknya anggota DPR yang belum memiliki sifat kenegarawanan, menjadi salah satu alasan penolakan publik terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Karena itu, akan berbahaya jika revisi tetap dilanjutkan, sebab justru mengakibatkan pelemahan institusi pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal itu, dikemukakan rohaniwan, Romo Benny Susetyo, kepada wartawan, di restoran Pulau Dua, Jakarta, Jumat (4/12).

"Saat ini kan masih banyak politikus yang memikirkan diri sendiri. Saya khawatir, jika DPR tetap melanjutkan revisi UU KPK, maka akan membahayakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, karena semangat revisi itu sejak awal melemahkan KPK, terlebih lagi wacana revisi ini merupakan inisiatif DPR," ujar Benny.

Karena itu, Romo Benny dengan tegas menolak pembahasan revisi UU KPK di DPR. Alasannya, masih banyak anggota DPR yang belum bersifat negarawan. Untuk itu, dia pun mengajak publik menolak dilanjutkannya revisi UU KPK tersebut.

"Jangan dilakukan sekarang dengan kondisi politik seperti ini, jika anggota DPR belum memiliki sifat sebagai negarawan," ujar Benny.

Dia meyakini, revisi UU KPK dapat mengakibatkan pelemahan institusi pemberantasan korupsi di Indonesia. Terlebih masih banyak politikus yang memikirkan diri sendiri.

"Politik kita masih banyak mementingkan diri sendiri, bukan bangsa dan negara. Sejatinya dalam transisi demokrasi, jangan dulu mengubah sesuatu yang belum pasti, karena akan berbahaya jika revisi UU KPK terus dilakukan sehingga bisa menimbulkan ketidakpastian," katanya lebih lanjut.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa rencana dilanjutkannya revisi UU KPK, hanyalah meneruskan mandat dari rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR beberapa waktu lalu. Dalam mandat itu, dipertanyakan apakah sang kepala negara setuju dengan revisi UU KPK.

Selain itu, dia juga merujuk hasil rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo yang berlangsung sebulan lalu.

"Waktu itu, Presiden Jokowi mengatakan, kita lihat waktu. Maka terus terang saya menyatakan sikap kita di depan Presiden dalam rapat konsultasi itu bahwa kami tidak mau lagi DPR jadi korban seolah-olah merupakan pihak yang menginginkan perubahan itu. Kami cuma memberikan pertimbangan dan waktu itu pertimbangan-pertimbangan kita tidak bisa dibantah," ujar politisi PKS itu.

Dia menyatakan, setelah melihat sikap Jokowi seperti itu, pihaknya memutuskan bahwa DPR akan membahas RUU KPK jika Jokowi setuju membahasnya. Untuk itu, Fahri menyarankan, jika Jokowi setuju ada pembahasan tentang revisi UU KPK, sebaiknya mengirimkan ampres (amanat presiden) agar tidak hanya DPR yang menjadi pihak yang selalu dipersalahkan. **(gan)**